

**STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL  
DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI  
DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Kabupaten Pesisir Barat)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh :**

**ANDI SETIONO**

**NPM : 1351010152**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H/ 2019 M**

**STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL  
DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI  
DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh :**

**ANDI SETIONO**

**NPM : 1351010152**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E,M,Si**

**Pembimbing II : Vitria Susanti,M.A.,Mec.Dev.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H/ 2019 M**

## **ABSTRAK**

Studi ini mengkaji tentang strategi pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan strategi dalam pembangunan daerah tertinggal. Adapun cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan penekanan ilmiah atau temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi. Teknik analisis ini menggunakan analisis SWOT, analisis SWOT merupakan teknik historis yang terkenal dimana para stakeholder membentuk gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis daerah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki sumberdaya alam yang berciri sektor pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Terdapat empat strategi utama untuk pengembangan daerah tertinggal di daerah Kabupaten Pesisir Barat yaitu dengan cara memadukan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang berbasis potensi sumberdaya lokal melalui : (a) Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. (b) Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan budaya daerah. (c) Meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. (d) Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian daerah Pesisir Barat sudah melaksanakan program-program strategi dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai mana mestinya hanya saja program-program tersebut belum berjalan secara optimal.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jalan Letkol H. Endro Sutarmidjohardjo I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 793260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya  
Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif  
Ekonomi Islam**  
**Nama : Andi Setiono**  
**NPM : 1351010152**  
**Prodi : Ekonomi Syariah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si.**  
**NIP.**

**Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev**  
**NIP.**

**Menyetujui**

**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Madnasir, S.E., M.Si.**  
**NIP. 197504242002121001**



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratminto Sukarame Bandar Lampung-Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "**Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Ekonomi Islam.**" disusun oleh : **Andi Setiono**, NPM : **1351010152**, Prodi : **Ekonomi Islam**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jumat, 08 Oktober 2019**.

**TIM MUNAQASAH**

Ketua Sidang : **Any Eliza S.E., M.Ak.**

(.....)

Sekretaris : **Dedi Satriawan, M.Pd**

(.....)

Penguji I : **Dedi Fermansyah, SE., M.Si.**

(.....)

Penguji II : **Dr. Heni Novirrita, S.E., M.Si.**

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Ruslan Abdul Chofur, M.S.I**  
NIP. 198008012003121001

## MOTTO

... فِيهَا وَأَسْتَعْمَرَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ مِمَّنْ أَنْشَأَكُمْ هُوَ

*"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya" (Qs. Hud : 61).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2010), h. 402.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat ALLAH AWT Dzat yang tiada bandingannya yang telah menjadikan segala sesuatu yang sulit ini menjadi mudah. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam ku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Musono dan Ibu Admini yang aku hormati dan aku banggakan. Selalu menguatkan dan mendoakan sepenuh jiwa raga, merawatku, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang sangat luar biasa, dan mendoakanku agar selalu ada dalam Jalan-Nya.  
Semoga selalu dalam lindungan ALLAH SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Saudara-saudara, adik serta keluargaku yang selalu memberikanku semangat dan memotivasiku sehingga bisa membuat diriku yang tadinya lemah bisa menjadi kuat serta lebih berkualitas.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Andi Setiono, dilahirkan di Desa Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 08 Maret 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Musono dan Ibu Admini. Adapun Riwayat pendidikan penulis yaitu SD N I Bandar Agung pada Tahun 2001, SMP N I Bandar Negeri Suoh pada Tahun 2007. SMA N I Bandar Negeri Suoh diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 memutuskan masuk keperguruan tinggi Intitusi Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung yang pada tahun 2017 bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penulis memilih Program Studi Ekonomi Syari'ah. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b>	.....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b>	.....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b>	.....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b>	.....	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	.....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>vi</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul	.....	1
B. Alasan Memilih Judul	.....	2
C. Latar Belakang Masalah	.....	3
D. Rumusan Masalah	.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	.....	9
F. Metode Penelitian	.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Strategi dan Pengembangan Daerah	.....	18
B. Pembangunan Daerah Tertinggal	.....	19
C. Konsep Pembangunan Daerah Dalam Islam	.....	27
D. Analisis SWOT	.....	36
E. Penelitian Terdahulu	.....	40

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

A. Gambaran umum Daerah atau Kabupaten	42
B. Aspek Geografi	43
1. Letak, Luas dan Batas Wilayah	43
2. Letak Kondisi Geografis	45
3. Geologi	46
4. Hidrologi	48
5. Cagar Budaya dan Cagar Alam	49
6. Penggunaan Lahan	49
7. Potensi Pengembangan Wilayah	51
8. Kawasan Rawan Bencana	51
9. Kawasan Budidaya	53
C. Aspek Demografi	61
1. Perekonomian Masyarakat	63
2. Sumberdaya Manusia	65
3. Sarana dan Prasarana	66
4. Kemampuan Keuangan Daerah	67

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	70
1. Gambaran Pelaksanaan Penelitian	70
2. Analisis Data Penelitian	70

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahan pemahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan. Judul Skripsi ini yaitu “Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam.

Strategi adalah perencanaan (*planing*) untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka panjang.<sup>2</sup> Pengembangan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap cara tersebut terus dilakukan.<sup>3</sup> Daerah tertinggal Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004) daerah tertinggal adalah daerah atau kabupaten yang relatif

---

<sup>2</sup>Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.32

<sup>3</sup> Hendayat Sutopo, Westy Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 45.

kurang berkembang dibandingkan daerah lainnya dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal.<sup>4</sup> Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi atau juga bisa diartikan sebagai cara pandang.<sup>5</sup> Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumberdaya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi yang digunakan dalam upaya percepatan pembangunan Ekonomi daerah menurut perspektif Ekonomi Islam

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pesisir Barat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat terlihat belum merata, masih banyak anggota masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, akses belum memadai dan lingkungan di bawah standar.<sup>7</sup> Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah, swadaya masyarakat kurang berkembang, bahkan

---

<sup>4</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.. *Penentuan Wilayah Tertinggal*. 2005.

<sup>5</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 675.

<sup>6</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19.

<sup>7</sup>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, *Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Pesisir Barat Tahun 2015*

sering terhambat perkembangannya sebagai akibat suatu kebiasaan tertentu yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sumber daya yang ada di kabupaten Pesisir Barat sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Apabila dipergunakan dan dimanfaatkan dengan bijak oleh pemerintah dengan mendayagunakan masyarakat, sebagaimana konsep pembangunan Islam yang menganggap masyarakat sebagai obyek utama dalam pembangunan, maka hal ini tentunya berpengaruh pada aspek pendapatan daerah, yang pada akhirnya berpengaruh pada pembangunan, infrastruktur dan sebagainya, maka tentunya pemberdayaan oleh pemerintah daerah perlu diberlakukan, sebagai pemegang otoritas kebijakan yang harus diterapkan dalam menanggulangi ketertinggalan pembangunan.

## **2. Alasan Subjektif**

Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Ketertinggalan Pembangunan disuatu daerah harus mandapati perhatian yang serius, disebabkan banyak kasus yang membuktikan bahwa merebaknya tekanan kemiskinan, tingkat pengangguran tinggi, angka melek huruf serta

kurangnya kemampuan daya beli masyarakat menyebabkan timbulnya sejumlah akibat yang kontra-produktif bagi pembangunan.<sup>8</sup>

Seperti dikatakan Kwik Kian Gie di dalam tulisan Lesna Wanita, apabila hal tersebut tidak segera tertangani akan memicu : (1) tingginya beban Sosial Ekonomi yang harus ditanggung masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktifitas sumber daya manusia, (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (5) menurunnya kepercayaan masyarakat pada birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan (6) kemungkinan terjadinya kemerosotan mutu generasi yang akan datang.<sup>9</sup>

Daerah tertinggal merupakan suatu daerah yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Berdasarkan kriteria daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: (1) perekonomian masyarakat, (2) Sumberdaya Manusia, (3) Prasarana (*infrastruktur*), (4) Kemampuan keuangan daerah, (5) Aksesbikitas dan, (6) Karakteristik daerah. Pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya dimana tidak hanya meliputi pembangunan aspek ekonomitetapi

---

<sup>8</sup>M.J Kasiyanto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*. (Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara: jakarta), 1991,h.2.

<sup>9</sup>Lesna Wanita, "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Inuman Tahun 2007-2011".*Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2014), h. 1.

juga aspek sosial, budaya dan keamanan. Berdasarkan kriteria tersebut Pesisir Barat termasuk daerah tertinggal.<sup>10</sup>

Berdasarkan kondisi jalan di Kabupaten Pesisir Barat yang rusak akibat rendahnya tingkat kemantapan jalan diperparah dengan tonase kendaraan yang jauh lebih berat dibanding dengan kelas jalan yang dilalui, akibatnya jalur lalu lintas menjadi terhambat. Disamping itu masih terdapat wilayah yang terisolasi yang bertopografi di pegunungan, yang menyebabkan aksesibilitas penduduk rendah. Pada beberapa daerah masih terdapat daerah yang terisolasi karena akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Akibatnya sebagian besar penduduk mengalami kesulitan melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial. Dengan sebaran penduduk yang mengelompok tersebut, berdampak pada kesulitan penyediaan energi listrik dan sarana telekomunikasi. Sejak tahun 2014 kondisi infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat selalu mengalami perubahan, tercatat kondisi jalan sampai di tahun 2017 mengalami peningkatan.<sup>11</sup>

Tabel 1.2  
Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat 2014-2017

No	Kondisi Jalan	Tahun	
		2014	2017

<sup>10</sup>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Pesisir Barat Tahun 2015, *Op.Cit*, h. 9.

<sup>11</sup> Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), *Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015*, (Kabupaten Pesisir Barat: TKPK, 2015), h. 106.

1	Baik (Km)	80,35	174,35
2	Rusak Ringan (Km)	45	95
3	Rusak Sedang (Km)	56,95	56,95
4	Rusak Berat (Km)	206,5	285,85

Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017*

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memiliki target anggaran pendapatan daerah pada tahun 2017 sebesar 766,30 miliar rupiah. Dari nominal tersebut, berhasil tercapai sebesar 738,44 miliar rupiah. Pendapatan daerah tersebut utamanya bersumber dari Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) yang berhasil direalisasikan sebesar 645,54 miliar rupiah yang terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus; dan Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Tabel 1.5  
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat  
(Miliar Rupiah).2017

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Miliar Rupiah)	
		Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19,79	20,71
2	Pendapatan Transfer	674,32	645,54
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	72,14	72,18

<b>Jumlah</b>	<b>766,30</b>	<b>738,44</b>
---------------	---------------	---------------

Sumber: *Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pesisir Barat*, 2017

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat adalah arah strategi pemerintah daerah yang cenderung berorientasi pada pembangunan wilayah yang paling mudah dikembangkan menjadi daerah pusat-pusat pertumbuhan dan kecenderungan untuk mengesampingkan daerah yang miskin potensi, disamping itu terjadi kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat.<sup>12</sup> Kondisi daerah Pesisir Barat meskipun mempunyai potensi yang besar, namun pengelolaannya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini menyebabkan daerah-daerah yang relatif jauh dari pusat pertumbuhan dan relatif miskin sumber daya menjadi daerah yang tertinggal dalam pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat, perlu mempunyai strategi pembangunan yang dilengkapi dengan program redistribusi pendapatan, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memperbaiki tingkat pendapatan yang berujung pada pembangunan perekonomian serta diantaranya untuk penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, yang demikian itu perlu dilakukan identifikasi terkait permasalahan di setiap wilayah kabupaten Pesisir Barat dan selanjutnya disusun strategi yang relevan. Pemerintah daerah perlu menyusun berbagai program secara terintegrasi. Program tersebut haruslah *sustainable*, yaitu

---

<sup>12</sup>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Pesisir Barat.

perlu mempertimbangkan kondisi lokal dimana ketertinggalan itu bisa terjadi. Program dalam upaya percepatan pembangunan memerlukan strategi yang terarah dan jelas yang didasarkan pada prinsip kemandirian, yakni pemerintah pula dapat mempercayakan juga kepada masyarakat daerah itu sendiri, dalam pengelolaan sumber daya. Sehingga bukan saja program tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah untuk pembangunan ekonomi, akan tetapi juga akan membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat pribumi atau daerah setempat.

Sebagaimana firman Allah Swt :

جَدَّتْ بَعْضٌ فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا الدُّنْيَا الْحَيَوٰةَ فِي مَعِيَشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَحْمَتَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَحْمَتٌ يَّقْسُمُونَ أَهْمًا  
تَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ وَرَحْمَتٌ سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضِهِمْ لِيَتَّخِذُوا

*Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Qs. Az-Zukhruf : 32).*<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kiaracondong Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 489.

Pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan perlu menerapkan program-program sebagai strategi dan bentuk kebijakan yang tidak lepas dengan berdasarkan konsep pembangunan Ekonomi Islam. Sebagaimana mayoritas penulis memahami konsep pembangunan ekonomi dari beberapa ayat Al-Qur'an.

... فِيهَا وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِمَّنْ أَنْشَأْتُمْ هُوَ

"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya" (Qs. Hud : 61).<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat di atas mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan. Pertama makna *Al-Wujub* atau kewajiban umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan.<sup>15</sup> Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membangun jagad raya.<sup>16</sup> Perintah Allah SWT tersebut bersifat wajib dan mutlak. Mayoritas penulis berpendapat kata *Al-Imarah* (memakmurkan) identik dengan kata *at-tanmiyah al-iqtisadiyah* (Pembangunan Ekonomi). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Prespektif Ekonomi Islam*"

---

<sup>14</sup>Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 402.

<sup>15</sup>Ahmad Ibn Ali Al-Jassas, *Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Mathba-ah al-Auqof al-Islamiyah, 1335 H), h. 432.

<sup>16</sup>Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami'li - Ahkam Al-Quran* (Dar al-Kutub al-Misriyah, 1369 H), h. 648.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerah perspektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana Strategi peluang, ancaman, kelemahan dan kekuatan dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di daerah Kabupaten Pesisir Barat?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana Strategi peluang, ancaman, kelemahan dan kekuatan dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerah dalam perspektif Ekonomi Islam.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ; *Pertama* bagi akademisi, memberikan sumbangsih hasil pemikiran tentang langkah kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat serta menambah literatur kepustakaan yang relevan dengan bidang Studi Ekonomi Pembangunan ; *Kedua* bagi penulis,

menambah wawasan mengenai strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerah dalam perspektif Ekonomi Islam.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan; *Pertama* bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan rekomendasi untuk membuat strategi yang sistematis dan terencana, yang dapat dituangkan pada program-program dalam upaya percepatan pembangunan. *Kedua* bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai strategi pemerintah daerah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya ikut berpartisipasi membangun daerah yang berlandaskan konsep pembangunan Ekonomi Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Secara keseluruhan jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi.<sup>17</sup> Bilamana terdapat ilustrasi yang menunjukkan data-data berupa angka tabulasi, hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mempertajam analisa dan memperkuat argumentasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu

---

<sup>17</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet. Ke-8* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997), h. 6.

suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk interpretasi, gambaran, dan lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena.<sup>18</sup>

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara.<sup>19</sup>Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan secara langsung, kemudian dipilih beberapa responden secara sengaja seperti Kabid dan Aparatur bagian perencanaan di Bappeda, serta masyarakat dan nelayan sebagai pendukung guna kelengkapan data.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.<sup>20</sup>Data sekunder juga merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel dan diagram.<sup>21</sup>Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 33.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Cet Ke-5 (Bandung: CV Alfabeta, 2003), h. 32.

<sup>20</sup> Soeranto, Licolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Hukum dan Bisnis* ( Yogyakarta: UPP YKPN, 1990), h. 76.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 76

sekunder meliputi data dokumen/arsip resmi terkait Dana Desa yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pusat/kabupaten, data kementerian maupun lembaga yang terkait.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh data maupun informasi yang relevan, valid dan akurat. Data-data yang diperoleh kemudian di triangulasi metode untuk mengamati dan membaca keabsahan data. Adapun beberapa metode pengumpulan data penelitian menurut Suryana (2010) adalah sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Untuk pengumpulan data utama (sebagai sumber data primer), peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten.

#### **b. Observasi**

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>22</sup> Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan yang terarah, terencana dan sistematis. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengamati masalah dan fenomena dimasyarakat,

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 145

kemudian memahami fenomena/masalah tersebut dan kemudian mencari jawaban melalui fakta dan kejadian di lapangan yang merupakan objek penelitian.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto, dan juga berbentuk file di server, dan *flashdisk*, serta data yang tersimpan di *website*. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.<sup>23</sup>Data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan pemerintah Negara, Provinsi/Kabupaten tentang Percepatan *Pembangunan Daerah* Tertinggal, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi/Kabupaten, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi/Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan berita resmi tentang perekonomian Provinsi/Kabupaten.

## **3. Subyek dan Objek Penelitian**

### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah data penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara dan observasi yang berupa sikap, ekspresi, pendapat, pengalaman, karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek

---

<sup>23</sup> Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141.

penelitian (responden).<sup>24</sup>Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Kepala Bidang dan Aparatur bagian Perencanaan di Bappeda, serta masyarakat dan nelayan di Kabupaten Pesisir barat.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah tempat penelitian dimana fanomena atau gejala sosial yang akan diteliti.<sup>25</sup>Dalam penelitian ini objek penelitiannya bertempat di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

#### **4. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dikelola dan dianalisis dengan beberapa cara antara lain:

##### **a. Reduksi data**

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci.Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting.Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah reduksi akan memberikan

---

<sup>24</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.158

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 292

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>26</sup>

#### b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bias dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, pictogram dan lain sebagainya. Melalui penyajian data tersebut

maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>27</sup>

#### b. Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>28</sup>

### **5. Analisis Data**

Setelah kelanjutan dari pada kegiatan pengumpulan data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Analisis SWOT. Menurut Jogiyanto (2006), SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h.247.

<sup>27</sup>Ibid,h,249.

<sup>28</sup>Ibid,h,252.

daerah dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi.<sup>29</sup>Strategi yang dimaksud yaitu memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan.<sup>30</sup> Berikut ini merupakan penjelasan dari SWOT, yang dikemukakan oleh David, Fred R (2005), yaitu:

1. Kekuatan (*Strengths*). Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan dan keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan apa yang dimiliki daerah tersebut. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi daerah-daerah lain.
2. Kelemahan (*Weakness*). Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumberdaya keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan suatu daerah.
3. Peluang (*Opportunities*). Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan. Kecendrungan-kecendrungan penting merupakan salah satu sumber peluang.
4. Ancaman (*Threats*). Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan. Ancaman juga bisa berupa peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau direvisi dapat memberikan ancaman bagi suatu daerah yang ingin berkembang.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Jogiyanto, *Sistem Informasi Strategik Untuk Keunggulan Kompetitif* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 46.

<sup>30</sup>David, Fred R, *Manajemen Strategis, edisi ke-10* (Jakarta: Selamba Empat, 2006), h. 8.

<sup>31</sup>David, Fred R, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Selamba Empat, 2005), h. 47.

5. Berdasarkan teori di atas maka fungsi SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkan dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman)..Secara kualitatif, analisis ini merupakan alat analisis yang biasa digunakan untuk melakukan analisis situasional dalam formulasi strategi. Dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari hasil penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal yang kemudian dikaitkan dengan konsep pembangunan ekonomi islam dan berbagai teori yang berkaitan dengan pokokpermasalahan dalam penelitian ini.

Metode berfikir yang digunakan, yaitu deduktif. Deduktif adalah metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio-rasio.<sup>32</sup>Dengan metode ini, penulis mengambil kesimpulan dari pernyataan yang umum, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan daerah teringgal. Kemudian menuju pernyataan yang khusus, yaitu memaparkan keadaan dilapangan, disini penulis memaparkan bagaimana responsif pemerintah terhadap daerah tertinggal dalam bentuk program yang dijadikan sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah, dan kemudian dianalisis dengan konsep pembangunan ekonomi islam.

---

<sup>32</sup>Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*(Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 6.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi Strategi dan Pengembangan Daerah

Secaraetimologi strategi adalah kata dalam bahasa Yunani, *strategos*. Adapun *strategos* dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zamandemokrasi Athena.<sup>33</sup> Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya semuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses *public* merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” diambil dari kata *stratos* yang berarti militer

---

<sup>33</sup><sub>1</sub> [www.answer.com/system](http://www.answer.com/system), (16 Mei 2007)

danyangberarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.<sup>34</sup>

Menurut Friedman dalam Hanafiah (1988) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan wilayah adalah merupakan proses memformulasikan tujuan-tujuan sosial dan peraturan ruang untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan sosial tersebut.<sup>35</sup> Ruang merupakan dasar yang penting bagi seorang perencana wilayah dalam membuat rencana sektoral nasional dan program-program pembangunan wilayah, serta merencanakan lokasi kegiatan tertentu di suatu wilayah ada di suatu lokasi tingkat lokal.

## **B. Pembangunan Daerah Tertinggal**

### **1. Pengertian Daerah tertinggal**

Berdasarkan RPJM ditetapkan dengan Perpers No.5 tahun 2010, pengertian daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk

---

<sup>34</sup>Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), 8

<sup>35</sup>Hanafiah, T. *Strategi Pembangunan Wilayah Pedesaan*. IPB. Bogor. 1989

yang relatif tertinggal.<sup>36</sup> Ketertinggalan daerah tersebut dapat diukur berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004) wilayah tertinggal juga pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam.<sup>37</sup>

Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain. Wilayah tertinggal dalam kerangka penataan ruang nasional didefinisikan sebagai wilayah budidaya yang secara ekonomi jauh tertinggal dari rata-rata nasional, baik akibat kondisi geografis, maupun kondisi sosial beserta infrastrukturnya. Pengertian yang lebih umum menyebutkan bahwa wilayah tertinggal merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan keterbatasan aksesibilitasnya ke pusat-pusat pemukiman lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari

---

<sup>36</sup>Siskarosa Ika Oktora, "Pemodelan dan Pengklasifikasian Kabupaten Tertinggal Di Indonesia Dengan Pendekatan *Multivariate Adaptive Regression Splines* (Mars)" (Online), tersedia di: [pustaka.unpad.ac.id](http://pustaka.unpad.ac.id) (14 April 2017), h. 1.

<sup>37</sup>Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, "Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Identifikasi Masalah-Masalah Ketertinggalan Kabupaten Daerah Tertinggal", (On-line), tersedia di: [www.ditjenpdt.kemendesa.go.id](http://www.ditjenpdt.kemendesa.go.id) (14 April 2017), h. 16.

pedesaan lainnya dalam mengikuti dan memanfaatkan hasil pembangunan nasional dan daerah.<sup>38</sup>

## 1. Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal

Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004) penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria daerah dasar yaitu: (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia, (3) prasarana dan sarana (*infrastruktur*), (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah, dan (6) berdasarkan kabupaten yang beradadi daerah perbatasan antar Negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik.<sup>39</sup> Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal juga menyebutkan bahwa faktor penyebab suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal yaitu antar lain :

- 1) Geografis: Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.
- 2) Sumberdaya Alam: Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun

---

<sup>38</sup>Abdul Wahid, "Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Study kasus: Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat". (Skripsi Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006), h. 13.

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 16

lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.

- 3) Sumberdaya Manusia: Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan atau institusi yang belum berkembang.
- 4) Prasarana dan Sarana: Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
- 5) Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial: Seringnya suatu daerah mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.
- 6) Kebijakan pembangunan: Suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.<sup>40</sup>

Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, bahwa daerah tertinggal sangat kompleks dengan permasalahan-permasalahan, hal inilah yang menjadi tantangan bagi *stakeholders* dalam upaya penanganan pembangunan daerah tertinggal.

---

<sup>40</sup>Keputusan Kementrian Negara Pembangunan Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang daerah tertinggal.

Namun, sekelewat permasalahan yang dihadapi khususnya pada daerah tertinggal juga berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus pada daerah yang dimaksud, agar dalam membuat suatu strategi pembangunan daerah tertinggal dapat dirumuskan langkah-langkah yang strategis sehingga pencapaian target bisa lebih tepat pada sasaran.

## **2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal**

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program, penyelesaian wilayah tertinggal perlu menggunakan prinsip-prinsip pengembangan yaitu sebagai berikut : (a) berorientasi pada masyarakat (*people centered*) : masyarakat di wilayah tertinggal adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, (b) berwawasan lingkungan (*environmentally sound*) : berkembangnya kebutuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh perubahan sosial ekonomi dan modernisasi dapat mendorong terciptanya kegiatan merusak lingkungan seperti pengrusakan hutan lindung dan terumbu karang, (c) sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat (*culturally appropriate*) : pengembangan kegiatan yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan masyarakat perlu memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah berkembang sebagai suatu kearifan tradisional (*traditional wisdom*) dalam kehidupan masyarakat setempat, dan memperkaya khasanah budaya bangsa, (d) sesuai kebutuhan masyarakat (*socially accepted*) : kegiatan pengembangan wilayah tertinggal harus berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat penerima manfaat dan bukan berdasarkan asas pemerataan dimana setiap daerah berhak atas bantuan pendanaan dari pemerintah, dan (e) tidak

diskriminatif (*nondiscriminative*) ; prinsip ini digunakan agar kegiatan penanganan wilayah tertinggal tidak dibedakan pada kepentingan pihak tertentu, yang pada akhirnya dapat mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran program.<sup>41</sup>

Seperti yang tersirat dalam definisi wilayah tertinggal, ternyata karakteristik wilayah dan masyarakat wilayah tertinggal menunjukkan perbedaan yang cukup berarti dengan wilayah lain di Indonesia, maka pendekatan penanggulangan di wilayah tertinggal tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi tetapi sifatnya harus lebih menyeluruh dan merata pada semua aspek pembangunan. Perlu menjadi catatan bagi pemerintah daerah bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik negatif maupun yang positif.<sup>42</sup> Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 20.

<sup>42</sup> Abdul Wahab. Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 51

Setelah ada suatu kebijakan maka perlu perumusan strategi, hal ini dimaksudkan agar setiap strategi pembangunan daerah tertinggal yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian, antara kebijakan dan strategi harus menunjukkan kesinergikan sehingga setiap kebijakan dan strategi yang sudah dirumuskan dapat langsung mengenai sasaran. Strategi-strategi yang dimaksud meliputi :

- 1) Pengembangan ekonomi lokal : strategi ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat, melalui pemerintahan daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada.
- 2) Pemberdayaan masyarakat : strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
- 3) Perluasan kesempatan : strategi ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju.
- 4) Peningkatan kapasitas : strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal.
- 5) Peningkatan Mitigasi dan Rehabilitasi : strategi ini diarahkan untuk mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam.

Bertolak dari konsep strategi pengembangan kawasan di kabupaten yang tertuang dalam laporan perencanaan dan pengendalian strategi pengembangan kawasan tertinggal, maka konsep rencana strategi nasional pengembangan kawasan tertinggal pada masa yang akan datang diharapkan dapat menjadi suatu acuan kerja dan pedoman strategi pembangunan yang di dasarkan atas lima strategi dasar yaitu :

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar (*Basic Needs Development*)
- 2) Berpusat pada manusia (*People Centered Development*)
- 3) Pertumbuhan sekaligus pemerataan (*Redistribution With Growth* )
- 4) Partisipatif (*Participation Approach*)
- 5) Keberlanjutan (*Sustainable Development*).<sup>43</sup>

### **3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Semua pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh adanya sektor basis. Penempatan kriteria pertumbuhan sebagai dasar penetapan kawasan adalah relevan dengan teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux. Pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama. Menurut Perroux, dalam tulisan Sjafrizalkota merupakan suatu tempat sentral sekaligus kutub pertumbuhan. Artinya, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat

---

<sup>43</sup>*Op.Cit*, h. 24

terutama daerah perkotaan yang di sebut sebagai pusat pertumbuhan dengan instensitas berbeda. Dilain pihak diungkapkan bahwa industri unggulan merupakan penggerak utama pembangunan daerah sehingga dimungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah, sehingga perkembangan industri suatu daerah berpengaruh dalam perkembangan daerah lainnya.<sup>44</sup>

Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat menurut Todaro (2000) yaitu; (1) Akumulasi modal, meliputi semua investasi baru pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, (2) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, (3) Kemajuan teknologi. Lebih lanjut diungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah daya dukung ekonomi di dalam daerah seperti sumber daya manusia, investasi, sumber daya alam, sarana dan prasarana penunjang aktivitas. Sedangkan faktor eksternal yang merupakan kekuatan dari luar adalah campur tangan pemerintah yang diimplementasikan dalam penyaluran dana pembangunan melalui dana inpres dan dana bentuk lain pada daerah atau sektor yang diprioritaskan.

### **C. Konsep Pembangunan Ekonomi Islam**

---

<sup>44</sup>Sjafrizal, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, (Jakarta: Jurnal Buletin Prisma, 1997), h. 85.

Kata pembangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses atau cara tumbuh, bertambah dan berkembang, bertambah dan menjadi banyak, atau menumbuh-kembangkan segala sumberdaya yang tersedia agar bertambah menjadi banyak, namun dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan pembangunan berarti perubahan.<sup>45</sup> Tetapi dalam pandangan islam perubahan bukanlah segalanya, terdapat bagian-bagian lainnya seperti hukum tentang alam, tentang fiskal dan juga moral yang tidak berubah. Umat islam yakin bahwa ada sebagian sistem kehidupan yang tidak berubah juga bukan merupakan pelaku (subjek) modernisasi. Konsep pembangunan ekonomi islam lebih bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata, akan tetapi seperti yang ditegaskan oleh Kursyid meliputi aspek moral, sosial, material dan spiritual. Disamping itu pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, menghapus riba dan mewajibkan zakat.<sup>46</sup>

Menurut Mahrusy dalam tulisan Almizan, pembangunan ekonomi yang dimaksud dalam islam adalah *“The process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life”* (proses untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam pengertian ini maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitati dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat, keduanya

---

<sup>45</sup>PJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PWP, 2008), h. 134.

<sup>46</sup>Kursyid Ahmad, *Al-Tanmiyah al-iqtisodiyah fi ithorin islamiyin*, terjemahan rafiq al misri, (majalah abhas al-iqtisod al-islami, nomor 2, bagian 2), h. 46.

menurut Islam menyatu secara integral dan saling mempengaruhi.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Hasan dalam tulisan Almizan, memaparkan bahwa Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja penuh, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam.<sup>48</sup>

Perspektif lain dikemukakan oleh Muhammad dalam buku Djojohadikusumo, dengan menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun, bahwa pembangunan ekonomi yang ideal adalah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh umat manusia (*basic needs*) dan Dematerialisasi. Sebaliknya, fenomena konsumsi berlebihan, korupsi moral dan keserakahan ekonomi adalah indikator awal kejatuhan sebuah peradaban. Pada dasarnya dalam ekonomi pembangunan islam, bahwa apapun kondisi masyarakat terkait dengan soal sejahtera adalah pilihan yang diambil masyarakat bersangkutan. Meskipun kajian tentang masyarakat sejahtera cukup luas jika dilihat sesuai konsep peradaban islam saat ini, namun secara garis besar dapat diungkap secara singkat bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, masyarakat selalu berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan dengan menggunakan berbagai pendekatan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Almizan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume. 1, Nomor.2 (Juli-Desember 2016). h. 204.

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 205

<sup>49</sup>Djojohadikusumo, Sumitro, *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 197.

Menurut Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of National* bahwa sejahtera dapat diukur berdasarkan seberapa besar hasil barang serta jasa yang diproduksi dan dikonsumsi. Karenanya yang disebut dengan istilah wilayah maju adalah yang menikmati pendapatan tinggi tanpa memperhatikan tingkat kemunduran nilai-nilai spiritual masyarakatnya, sedangkan wilayah terbelakang adalah wilayah yang berpendapatan rendah. Pembangunan secara umum merupakan sasaran yang amat penting bagi setiap negara. Namun dunia modern hanya mengenal dua kutub teori pembangunan ekonomi yaitu kapitalisme dan sosialisme. Hal ini juga mewarnai sistem ekonomi dunia muslim saat ini, ketimbang pengaruh Islam.<sup>50</sup>

## **1. Dasar Hukum Pembangunan Dalam Perspektif Islam**

Hukum Syara' mengistimbatkan tentang membangun ekonomi, para penulis muslim terlebih dahulu mengkategorisasikan bahwa membangun ekonomi merupakan perbuatan terpuji karena di dalamnya terdapat maslahat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Islam mendorong penganutnya untuk membangun ekonomi dan menjadi kewajiban pemerintah. Pendapat tersebut mengacu pada pendapat syariat Islam yaitu menarik Maslahat dan menolak Mafsadah "*Jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid*" dan ini terdapat dalam pembangunan ekonomi. Atas dasar ini mereka menetapkan hukum membangun ekonomi menjadi perbuatan *al-*

---

<sup>50</sup>Manna, Muhammad A, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, (Jakarta: Intermasa, 2012), h. 81.

wajib. *Dunya* misalnya mengatakan bahwa membangun ekonomi merupakan kewajiban yang sacral “*fardun muqqadas*” dan bersifat keagamaan.<sup>51</sup>

Terdapat beberapa firman Allah SWT yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi salah satunya ada dalam firman Allah QS. Al-An'aam [6] ayat 99 dalam ayat ini ditegaskan bahwasannya Allah SWT telah menyediakan sumber daya alam yang berlimpah dan terdapat manfaat di dalamnya:

ضَرَامِنَهُ فَأَخْرَجْنَا شَيْءٍ كُلِّ نَبَاتٍ بِهِ ۚ فَأَخْرَجْنَا مَاءَ السَّمَاءِ مِنَ الْذِي وَهُوَ  
نَابٍ مِّنْ وَجْنَتِدَا نِيَّةٍ قَنَوَانٍ طَلَعِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَمِنْ مُتْرَاكِبَا حَبَّامِنَهُ مُخْرَجُ خ  
إِنِّ وَيَنْعِهِ ۚ أَثْمَرِ إِذَا ثَمَرِهِ ۚ إِلَىٰ أَنْظُرُوا مُتَشَبِهِهِ وَغَيْرِ مُشْتَبِهَاتِهَا وَالرُّمَانَ وَالزَّيْتُونَ أَع  
يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman (QS. Al-An'aam : 99)”.<sup>52</sup>

Kemudian manusia dituntut untuk sadar bahwa Allah menciptakan sumberdaya alam untuk dimanfaatkan dan dikelola dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik secara lahiriyah dan batiniyah, termaksud untuk pemenuhan

---

<sup>51</sup> *Op.cit*, h. 135.

<sup>52</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkeleema, 2009), h. 140.

khususnya kebutuhan ekonomi agar terciptanya peningkatan kesejahteraan Seperti yang telah diterangkan Allah SWT dalam surat An-Nahl [16] ayat 69:

مُخْتَلِفٍ شَرَابٍ بُطُونَهَا مِنْ تَخْرُجُ ذُلًّا رَّبِّكَ سُبُلًا فَاسْلُكِي الثَّمَرَاتِ كُلِّ مِنْ كُلِّ ثُمَّ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَذَّكَّرُ فِيكَ فِي النَّاسِ شِفَاءً فِيهِ الْوَانُورُ

*“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan” (QS An-Nahl: 69).<sup>53</sup>*

## 2. Tujuan Pembangunan Ekonomi

Teori ekonomi konvensional setidaknya memperkenalkan dua hal fundamental berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi. Pertama memperbaiki tingkat pendapatan riil individu. Kedua, menegakan keadilan distribusi pendapatan. Dua tujuan tersebut menjadi fokus pembicaraan dikalangan penulis muslim. Namun sebagian mereka menambahkan tujuan lain yang menjadi karakteristik masyarakat muslim. Quhaf dalam karyanya mengatakan tujuan pembangunan ekonomi untuk membentuk iklim yang kondusif bagi keagungan

---

<sup>53</sup>Op.Cit, h. 274.

nilai-nilai islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera secara material.<sup>54</sup> Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang memiliki karakteristik islami harus dapat meningkatkan komitmen umat islam terhadap agamanya. Al-Rubi mengkorelasikan pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Menurutnya tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga setiap individu dapat melaksanakan dan komitmen terhadap ajaran agama mereka.<sup>55</sup>

Menurut Yusuf Ibrahim, tujuan pembangunan ekonomi untuk merubah masyarakat sehingga mendapat Ridho Allah Swt.<sup>56</sup> Kursyid menambahkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk merealisasikan desentralisasi. Sedangkan menurut Siddiqi tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan keseimbangan dan memperbaiki peradaban.<sup>57</sup>

### **3. Arah dan Strategi Pembangunan**

Presepsi para ahli ekonomi untuk merumuskan arah dan strategi pembangunan nampaknya telah mengalami pergeseran. Pada awalnya strategi pembangunan ekonomi menitikberatkan pada konsep *Big-Push* (dorongan besar),

---

<sup>54</sup>Athif Ajwah, *Mahfum al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-fikr al-Iqtisodi al-Islami*, dalam majalah al-Iqtisod wa al-Idarah , (Jeddah: Markaz al-Buhus wa al-tanmiyah, 1985), h. 5.

<sup>55</sup>Mahmud Al-Rubi, *Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima'iyah* dalam majalah Al-Tijariyah wa al-Islamiyah, nomor 3, Tahun 1984, h.31.

<sup>56</sup>Yusuf Ibrahim, *Istiratijiyatu wa Tiknik al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah al-Islam* (Kairo: Al-Ittihad al-Dauli al-Bunuk al-Islamiyah, 1981), h. 221.

<sup>57</sup>*Op.Cit*, h. 59.

*take off* (lepas landas), *leaf-forward* (lompatan kedepan), *unbalanced growth* (pembangunan tak seimbang), *linkage* (kaitan), *growth inducing mechanism* (mekanisme yang mendorong pertumbuhan), *commercial point* (orientasi komersial), *disguised unemployment* (pengangguran tak kentara). Strategi tersebut telah semakin berkurang, karena strategi ini ternyata sangat tidak memuaskan. Strategi pembangunan yang demikian telah menimbulkan ketimpangan ekonomi, kelebihan kapasitas produksi, kepadatan perkotaan, pengangguran dan stagnasi pedesaan.

Dewasa ini telah bergeser pada strategi pembangunan yang baru yang menitikberatkan kepada *integrated rural development* (pembangunan pedesaan yang terpadu), *agricultural intensification* (intensifikasi pertanian), *intermediate technology* (teknologi madya), *appropriate education* (pendidikan yang layak), *labor force expansion* (ekspansi tenaga kerja), *small industries and export promotion* (promosi industri kecil dan ekspor), *employment generation* (penciptaan lapangan kerja), *nutrition and health development* (perbaikan gizi dan kesehatan), *social and human resources development* (pengembangan sumber daya manusia dan sosial), *income distribution* (distribusi pendapatan), dan *institutional change* (perubahan institusional).<sup>58</sup>

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi

---

<sup>58</sup>Kwik Kian Gie, *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan : Beberapa Pendekatan Alternatif*, (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 128.

maupun non-ekonomi. Akan tetapi itu lebih penting dalam menentukan sasaran pemangunan, karena kebijaksanaan ekonomi yang telah berhasil akan banyak mempengaruhi kebijaksanaan non-ekonomi dan dapat dikatakan baik fisik realita maupun keadaan fikiran yang dimiliki oleh masyarakat mencakup usaha-usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet pada dasarnya meliputi (1) kebutuhan hidup, (2) kebutuhan harga diri, (3) kebutuhan kebebasan. Menurut Todaro sasaran pembangunan yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pesediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
- 2) Menangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai yang manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memnuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
- 3) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan social bagi semua individu nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas strategi pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada:

- 1) Meningkatkan output nyata/produktivitas yang tinggi yang terus menerus meningkat. Karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian bahan kebutuhan pokok untuk hidup, termasuk penyediaan perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- 2) Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup.
- 3) Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan.
- 4) Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintah.<sup>59</sup>

#### **A. Percepatan Pembangunan Ekonomi**

Percepatan merupakan usaha untuk membuat sesuatu bergerak lebih cepat, percepatan dalam pembangunan adalah proses upaya, tindakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkordinasi dan terpadu untuk mempercepat kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Percepatan pembangunan dilakukan agar suatu lokasi dapat dioptimalkan sebagai sarana penunjang kegiatan ekonomi.<sup>60</sup> Setiap upaya percepatan pembangunan pasti mempunyai tujuan dari kegiatannya, yaitu untuk meningkatkan perekonomian daerah dan membuka peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah daerah dan

---

<sup>59</sup>Todaro, Micheal P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga jilid 2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 280

<sup>60</sup>Dina Fariani, "Efektivitas Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan di Kota Cilegon", (Skripsi Program Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2014). h. 22.

masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.<sup>61</sup>

Upaya percepatan pembangunan disuatu daerah dalam pandangan ekonomi islam harus didasarkan pada tujuan yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia didunia dan akhirat. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan *masalah* dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (*transendental*). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, Sabda Rasulullah Saw, ijma, *qiyas*, maupun *ijtihad* para ulama fikih.

## **D. Analisis SWOT**

### **1. Definisi Analisis SWOT**

SWOT merupakan akronim dari *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan) internal dari suatu perusahaan serta *Opportunities* (peluang) dan *Threat* (ancaman) lingkungan yang dihadapinya. Analisis SWOT (*SWOT analysis*) merupakan teknik historis yang terkenal dimana para *stakeholders* membentuk gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis

---

<sup>61</sup>Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h. 374.

daerah. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari “kesesuaian” yang baik antara sumber daya internal (kekuatan dan kelemahan) dengan situasi eksternal (peluang dan ancaman). Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.<sup>62</sup>

**Peluang** (*opportunity*) merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan daerah. Tren utama merupakan salah satu sumber peluang. Perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan investor dapat menjadi peluang bagi suatu daerah untuk berkembang. **Ancaman** (*threat*) merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu daerah. Ancaman merupakan penghalang utama bagi suatu daerah dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Masuknya pesaing baru, perubahan teknologi, dan direvisinya atau pembaruan peraturan dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan.

**Kekuatan** (*strength*) merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu daerah yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia bagi daerah tersebut.

---

<sup>62</sup>John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., *Edisi 10 Strategic Management (Manajemen Strategis) Formula, Implementasi, dan pengendalian*, (Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2002), h. 200.

**Kelemahan** (*weakness*) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu daerah relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan suatu daerah untuk berkembang.<sup>63</sup>

#### **a. Manfaat analisis SWOT**

Metode analisis SWOT merupakan metode analisis yang paling dasar dalam melakukan analisis strategi, yang bermanfaat untuk mengetahui suatu permasalahan ataupun suatu topik dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisis ini biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah kekuatan dan untuk menambah keuntungan suatu organisasi dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan yang dimiliki dan juga menghindari berbagai ancaman yang terjadi.

Jika digunakan dengan baik dan benar, maka analisis ini akan dapat digunakan untuk membantu melihat sisi-sisi yang terabaikan atau tidak terlihat dari sebuah daerah atau wilayah. Dari uraian diatas, analisis SWOT adalah instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi dalam manajemen suatu organisasi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi.<sup>64</sup>

#### **b. Tujuan, dan Fungsi Analisis SWOT**

---

<sup>63</sup>*Ibid*, h. 201.

<sup>64</sup>Faisal Hafid, Analisis SWOT Terhadap Pelayanan Pasien Rawat Jalan Ditinjau Dari Etika Kerja Islam (Studi pada RSUD Kota Agung), Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan Lampung, 2016, h. 38

## 1) Tujuan Analisis SWOT

Analisis SWOT mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang merupakan hal yang kritis bagi keberhasilan pembangunan suatu daerah.<sup>65</sup> Maka perlunya identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki daerah tersebut melalui telaah terhadap lingkungan dan potensi sumber daya alam dalam menetapkan sasaran dan merumuskan strategi yang realistis dalam mewujudkan misi dan misinya.

Berdasarkan definisi di atas maka tujuan analisis SWOT adalah untuk membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah di analisis. Apabila terdapat kesalahan, agar daerah itu harus mengelola untuk mempertahankan serta memanfaatkan peluang yang ada secara baik begitu juga pihak pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mengetahui kelemahan yang dihadapi agar menjadi kekuatan serta mengatasi ancaman menjadi peluang.

## 2) Fungsi Analisis SWOT

Fungsi dari analisis SWOT adalah untuk menganalisa mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi eksternal perusahaan.

---

<sup>65</sup>*Ibid* , hlm. 38

### **c. Keunggulan Analisis SWOT**

Berikut adalah keunggulan dari analisis SWOT antara lain:

- 1) Dapat dijadikan panduan dalam penyusunan kebijakan strategis menuju Visi yang telah di canangkan sebelumnya.
- 2) Dapat membantu memudahkan proses evaluasi berkaitan dengan penentuan kebijakan strategis sekaligus sistem perencanaan agar meraih kesuksesan dari waktu sebelumnya.<sup>66</sup>
- 3) Dapat dijadikan bagian penting untuk memperoleh informasi tentang beragam hal yang dibutuhkan menuju proses perubahan perbaikan masa mendatang.
- 4) Dapat meningkatkan motivasi dalam menemukan ide-ide kreatif untuk terus maju meraih kesuksesan yang ditargetkan sebelumnya.

### **d. Keterbatasan Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan pendekatan konseptual yang sangat luas, sehingga rentan terhadap beberapa kelemahan utama.

- 1) Analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal.
- 2) Analisis SWOT dapat bersifat statis dan berisiko mengabaikan kondisi yang berubah.
- 3) Analisis SWOT dapat terlalu menekankan pada satu kekuatan atau elemen strategi.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 40

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa hal yang penting diketahui dalam penelitian terdahulu adalah lokasi, teknik analisis, variable, dan hasil penelitian. Penelitian tentang strategi pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan daerah perspektif Ekonomi Islam, telah digunakan dalam berbagai penelitian,

Wahid Abdullah (2006) yang mengambil penelitian tentang strategi pembangunan daerah tertinggal studi kasus Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.<sup>68</sup> Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan (evaluasi) dalam menyusun rencana-rencana atau strategi pembangunan daerah tertinggal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu wilayah.

Imam Almasdi Syahza (2011), strategi pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan.<sup>69</sup> Hasil penelitian mengkaji wilayah Pesisir di Provinsi Riau yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan dengan

---

<sup>67</sup>*Ibid*, h. 206.

<sup>68</sup>Wahid Abdullah mengambil penelitian tentang strategi pembangunan daerah tertinggal studi kasus Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, 2006.

<sup>69</sup>Imam Almasdi Syahza strategi pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan, 2001.

kebijakan ekonomi melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat, pengembangan sektor pertanian diarahkan pada system agribisnis.

Samugyo Ibnu Redjo (2008) yang meneliti tentang strategi dan aksi percepatan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini mengkaji tentang pemerintah daerah yang belum mampu meningkatkan usaha-usaha perekonomian daerah yang berdampak kepada meningkatnya kemakmuran rakyat.

Edy Yusuf Agunggunanto (2006) yang meneliti tentang pembangunan daerah tertinggal melalui pegelolaan badan usaha milik daerah.<sup>70</sup> Hasil penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mewujudkan daerah mandiri melalui badan usaha milik daerah.

Indra Bangsawan (2017) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor pengembangan daerah tertinggal dan strategi menuju daerah mandiri.<sup>71</sup> Penelitian ini mengkaji wilayah Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang belum mampu menerapkan strategi menuju daerah mandiri menurut kementerian daerah.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, penelitian analisis spasial daerah tertinggal belum tentu memiliki kesamaan, karena berdasarkan lokasi memiliki perbedaan, secara teori, bahwa setiap lokasi memiliki ciri dan karakteristik

---

<sup>70</sup>Edy Yusuf Agunggunanto meneliti tentang pembangunan daerah tertinggal melalui pegelolaan badan usaha milik daerah,2006

<sup>71</sup>Indra Bangsawan meneliti tentang analisis faktor-faktor pengembangan daerah tertinggal dan strategi menuju daerah mandiri,2007.

tersendiri, sehingga dalam memperoleh informasi atau kondisi berbeda pula meskipun menggunakan metode analisis yang sama dengan wilayah lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab. Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Abdul Wahid, “Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Study kasus: Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat”. Skripsi Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006.

Ahmad Ibn Ali Al-Jassas, *Ahkam Al-Quran*, Kairo: Mathba-ah al-Auqof al-Islamiyah, 1335 H.

Al-Buraey, Muhammad A, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*/ Muhammad A. Al-Buraey; penerjemah, Achmad Nashir Budiman. Edisi, 1, Cetakan 1, Jakarta: Rajawali, 1986.

Almizan, “Pembangunan Ekonomi Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume. 1, Nomor.2 Juli-Desember 2016.

Armen Qodar, SP., MM, wawancara dengan penulis, Dinas Bappeda di Kabupaten Pesisir Barat, 26 Agustus 2017.

Athif Ajwah, *Mahfum al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-fikr al-Iqtisodi al-Islami*, dalam majalah al-Iqtisod wa al-Idarah , Jeddah: Markaz al-Buhus wa al-tanmiyah, 1985.

Azwin Rizkiano, *Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah periode 2004-2008 di Salatiga*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat,  
Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT)  
Pesisir Barat Tahun 2015.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat,  
Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT)  
Pesisir Barat Tahun 2015.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat,  
Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT)  
Pesisir Barat.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat,  
Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT)  
Pesisir Barat Tahun 2015.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.. *Penentuan Wilayah  
Tertinggal*. 2005.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, *Produk Domestik  
Regional Bruto Kabupaten Pesisir Barat Dalam Usaha, 2012*. Liwa, BPS  
Kabupaten Lampung Barat, 2016.

David, Fred R, *Manajemen Strategis* Jakarta: Selamba Empat, 2005.

David, Fred R, *Manajemen Strategis, edisi ke-10* Jakarta: Selamba Empat,  
2006.

Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV.  
Penerbit Diponegoro, 2010.

Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkeleema, 2009.

Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kiaracondong Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Jasa Media Utama, 1997.

Dina Fariani, "Efektivitas Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan di Kota Cilegon", Skripsi Program Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2014.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, "Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Identifikasi Masalah-Masalah Ketertinggalan Kabupaten Daerah Tertinggal, 14 April 2017.

Djojohadikusumo, Sumitro, *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Edy Yusuf Agunggunanto meneliti tentang pembangunan daerah tertinggal melalui pegelolaan badan usaha milik daerah, 2006

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Faisal Hafid, Analisis SWOT Terhadap Pelayanan Pasien Rawat Jalan Ditinjau Dari Etika Kerja Islam (Studi pada RSUD Kota Agung), Jurusan

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hanafiah, T. Strategi Pembangunan Wilayah Pedesaan. IPB. Bogor. 1989.

Hendayat Sutopo, Westy Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Imam Almasdi Syahza strategi pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan,2001.

Imron Rosidi (Warga Sipil),wawancara dengan penulis, dermaga seray di Kabupaten Pesisir Barat, 25Agustus 2017.

Indra Bangsawan meneliti tentang analisis faktor-faktor pengembangan daerah tertinggal dan strategi menuju daerah mandiri,2007.

IP.Tanjung, wawancara dengan penulis, Krui, Kabupaten Pesisir Barat 25 Agustus 2017.

IP. Tanjung, wawancara dengan penulis, rekaman, Kabupaten Pesisir Barat, 25 Agustus 2017

Istiqomah, Supriyantini. “Pemberdayaan Dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam. Komunitas” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* , Volume 4, Nomor 1, Juni2008.

Jogiyanto, *Sistem Informasi Strategik Untuk Keunggulan Kompetitif* Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., *Edisi 10 Strategic Management (Manajemen Strategis) Formula, Implementasi, dan pengendalian*, Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2002.

John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.

Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian* Jakarta: Kencana, 2011.

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* Bandung: Mandar Maju, 1996.

Keputusan Kementrian Negara Pembangunan Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang daerah tertinggal.

Kursyid Ahmad, *Al-Tanmiyah al-iqtisodiyah fi ithorin islamiyin*, terjemahan rafiq al misri, majalah abhas al-iqtisod al-islami, nomor 2, bagian 2.

Kwik Kian Gie, *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan : Beberapa Pendekatan Alternatif*, Jakarta: LP3ES, 1983.

Lesna Wanita, "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Inuman Tahun 2007-2011". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Oktober 2014.

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet. Ke-8* Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997.

Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-5*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

M.J Kasiyanto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*, Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara: Jakarta.

Mahmud Al-Rubi, *Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima'iyah* dalam majalah *Al-Tijjariyah wa al-Islamiyah*, nomor 3, Tahun 1984.

Manna, Muhammad A, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermedia, 2012.

Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurthubi, *Al- Jami'li – Ahkam Al-Quran* Dar al- Kutub al Misriyah, 1369 H.

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiya*, Bandung: Sinar Baru, 1991.

Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Jakarta, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015.

PJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PWP, 2008.

Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* Cet. XII Bandung: Mizan, 1994.

Rohi Baalbaki, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*, dar al  
Ilm Almalayin: Beirut, 1995.

Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*,  
Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.

Siskarosa Ika Oktora, "Pemodelan dan Pengklasifikasian Kabupaten  
Tertinggal Di Indonesia Dengan Pendekatan *Multivariate Adaptive Regression  
Splines*, 14 April 2017.

Sjafrizal, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah  
Indonesia Bagian Barat*, Jakarta: Jurnal Buletin Prisma, 1997.

Soeranto, Licolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Hukum dan Bisnis*  
Yogyakarta: UPP YKPN, 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:  
ALFABETA, 2014.

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Cet Ke-5 Bandung: CV Alfabeta,  
2003.

Thorik G. dan Utus H, *Marketing Muhammad* Jakarta: Gema Insani Press,  
2006.

Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), *Dokumen Strategi  
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun  
2015*, Kabupaten Pesisir Barat: TKPK, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,  
*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Todaro, Micheal P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga jilid 2*,  
Jakarta: Ghalia Indonesia, 198.

Wahid Abdullah mengambil penelitian tentang strategi pembangunan  
daerah tertinggal studi kasus Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat,2006.

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta:  
Graha Ilmu, 2010.

Yusuf Ibrahim, *Istiratijiyatu wa Tiknik al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah al-  
Islam* Kairo: Al-Ittihad al-Dauli al-Bunuk al-Islamiyah, 1981.